

# ANALISIS READINESS PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DENGAN PENDEKATAN SOFT SYSTEMS METHODOLOGY (SSM)

*by* 08032023 Purwatiningtyas

---

**Submission date:** 08-Mar-2023 02:38PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2031958410

**File name:** 2.\_ANALISIS\_READINESS\_PENERAPAN\_KETERBUKAAN.pdf (454.19K)

**Word count:** 6615

**Character count:** 44227

## ANALISIS *READINESS* PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DENGAN PENDEKATAN SOFT SYSTEMS METHODOLOGY (SSM)

Retnowati Retnowati<sup>1</sup>, Hersatoto Listiyono<sup>2</sup>, Purwatingtyas<sup>3</sup>,  
Alana Sharfina Wedaningsih<sup>4</sup>, Liana Rahmaziana<sup>5</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Manajemen Informatika <sup>4,5</sup>Mahasiswa

Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Stikubank

E-mail: <sup>1</sup>retnowati@edu.unisbank.ac.id, <sup>2</sup>hersatotolistiyono@edu.unisbank.ac.id,  
<sup>3</sup>purwati@edu.unisbank.ac.id, <sup>4</sup>alana.sharfina@gmail.com, <sup>5</sup>lianarahmaziana25@gmail.com

### Abstrak

Indonesia telah menerapkan Open Government Data (OGD) sejak tahun 2008, yaitu ketika Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 tahun 2008 disahkan. Pengelola KIP disebut sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang dilaksanakan melalui surat keputusan (SK) pimpinan tertinggi pada badan publik, dimana ketika konteksnya adalah pemerintah daerah, maka SK ditandatangani oleh Walikota atau Bupati. Secara faktual, Indonesia dimasukkan ke negara yang telah menginisiasi penerapan KIP tetapi berpotensi menghadapi kendala keberlanjutan penerapannya. Sampai dengan tahun 2017, jumlah kota yang telah menunjuk dan memiliki PPID masih sebesar 86,73% (85 kota dari 98 kota) se Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan adanya persoalan tentang tingkat kesediaan atau kesiapan (*readiness*) untuk mengadopsi sistem baru di dalam ruang lingkup kelembagaannya. Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi tentang kesiapan (*readiness*) untuk mengadopsi pengelolaan KIP untuk memberikan layanan informasi dan dokumen kepada masyarakat. Hasilnya diketahui bahwa faktor komitmen organisasi dan pengelola menjadi bagian dari rendahnya kualitas *readiness* pengelolaan KIP. Direkomendasikan melalui hasil pendekatan Soft Systems Methodology (SSM), agar dilakukan strategi *readiness* organisasi dan pengelola melalui penguatan tata kelola dan penguatan individu dengan dukungan infrastruktur dan pendanaan yang memadai.

**Kata kunci:** KIP, SSM, *Readiness*

### 1. PENDAHULUAN

Open Government Data telah diterapkan sejak tahun 2008 di Indonesia, yaitu ketika Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 tahun 2008 disahkan [1] yang kemudian dikenal dengan istilah keterbukaan informasi publik (KIP). Tahun 2011 Indonesia menjadi salah satu inisiator gerakan keterbukaan informasi oleh Pemerintah di seluruh dunia yang kemudian dikenal dengan Open Government Partnership (OGP). Satu tahun kemudian, gerakan Open Government Indonesia (OGI) juga diterapkan di Indonesia, oleh wakil Presiden Budidjono pada waktu itu. Jika pada Open Government Partnership (OGP) di tingkat dunia memiliki tiga unsur pendorong utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi [2], maka Indonesia memiliki tiga prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan yang terakhir adalah inovasi [3].

Penerapan UU KIP berlaku bagi seluruh badan publik, termasuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mula diberlakukan pada tahun 2010, melalui PP Nomor 61 tahun 2010. Pengelola KIP dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang dilaksanakan melalui surat keputusan (SK) pimpinan tertinggi pada badan publik, dimana ketika konteksnya adalah pemerintah daerah, maka SK ditandatangani oleh Walikota atau Bupati. Hal yang paling prinsip adalah PPID memiliki tugas dan tanggung jawab menginisiasi penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan kerjanya, bertanggungjawab untuk

mengelola kebutuhan informasi dan mempertahankan implementasinya agar tidak terhenti di tengah jalan.

Secara faktual, Indonesia dimasukkan ke dalam klaster ketiga, yaitu negara yang telah menginisiasi penerapan OGD tetapi berpotensi menghadapi kendala keberlanjutan penerapannya[4]. Jika dikaitkan dengan persoalan penerapan OGD secara Internasional, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia secara institusional, telah mengupayakan kesiapannya untuk menerapkan OGD melalui pola penunjukkan sebuah lembaga, yaitu PPID. Setiap PPID berkewajiban melaksanakan amanat undang-undang dengan sebaik-baiknya. Sampai dengan tahun 2017, jumlah kota yang telah menunjuk dan memiliki PPID masih sebesar 86,73% (85 kota dari 98 kota) se Indonesia. Padahal, UU KIP telah ditetapkan sejak 2008. Hal ini menunjukkan adanya persoalan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan atau kesiapan (*readiness*) untuk mengadopsi sistem baru di dalam ruang lingkup kelembagaannya. Sedangkan bagi kota yang telah memiliki PPID, mekanisme pengelolaan informasi yang dihimpun dan dipersiapkan untuk kepentingan publik, perlu untuk dicermati secara komprehensif, mulai dari awal pengumpulan data, penyeleksian informasi, penentuan terhadap keputusan unggah informasi atau disimpan, penelusuran dan perawatannya. Tidak hanya itu, keterkaitan antara PPID dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian menjadi PPID Pembantu di lingkungan kerjanya dalam rangka pengelolaan informasi juga menjadi sebuah hal yang menarik untuk didalami. Hal ini disadari sebagai sebuah persoalan bahwa implementasi kebijakan penerapan OGD dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, berupa terbatasnya kapasitas implementator dari segi pemahaman, komitmen dan teknis dari masing-masing pengelolaanya [5]. Perspektif pengelola, yaitu para pegawai yang bertanggungjawab mengelola informasi perlu dieksplorasi, sebab Janssen, dkk menyatakan bahwa seringkali faktor penghambat terhadap suatu adopsi sistem baru adalah para pengguna pertama[6]. Dinamika terhadap aspek kelembagaan dengan memperhatikan perspektif pengelola terhadap penerapan OGD sejak UU KIP diterapkan, menjadi titik utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi tentang kesiapan (*readiness*) untuk mengadopsi pengelolaan OGD untuk memberikan layanan informasi dan dokumen kepada masyarakat. Dalam pengelolaan informasi dan dokumen tersebut diperlukan suatu pemahaman konsep, metode, strategi atau model yang tepat terhadap pengelolaan informasi itu sendiri [7] dalam suatu organisasi agar mampu menghasilkan informasi yang sah dan pengelolaannya berkelanjutan. Sedangkan tentang adopsi, telah disinggung pula pada latar belakang bahwa adopsi ini merupakan adopsi terhadap sistem informasi yang didefinisikan sebagai keputusan untuk memanfaatkan penuh inovasi teknologi sebagai tindakan terbaik [8], [9]. Dengan memperhatikan paparan pada latar belakang masalah maka pada prinsipnya penelitian ini fokus pada analisa tingkat kesiapan (*readiness*) PPID didalam proses adopsi OGD untuk menerapkan keterbukaan informasi publik (KIP) bagi masyarakat.

Observasi awal yang dilakukan pemerintah kota (pemkot) Salatiga, sebagai wilayah penelitian, dapat diketahui bahwa pemkot Salatiga juga telah melakukan inisiasi pengelolaan OGD di daerahnya. Pengelolaan ini dilakukan oleh PPID yang bernaung dibawah Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) kota Salatiga. PPID kota Salatiga dibantu oleh OPD-OPD di lingkungan kerjanya, yang kemudian disebut dengan PPID Pembantu. Data dan informasi disediakan oleh PPID Pembantu, sehingga komunikasi antara PPID dan PPID Pembantu harus berjalan dengan baik agar kebutuhan data dan informasi dapat berjalan dengan baik. Para pengelola KIP di tingkat PPID maupun PPID Pembantu seharusnya orang-orang yang memahami dan memiliki kompetensi di bidang sistem informasi serta mengerti pengelolaan informasi berbasis teknologi informasi. Para pengelola KIP seharusnya adalah orang-orang yang mampu menghimpun, mengolah, menyajikan, menyebarluaskan dan menyimpan serta memelihara data dan informasi yang dimiliki berbasis pada teknologi

informasi. Sampai saat ini Pemkot Salatiga sudah menginisiasi KIP tetapi proses dan penerapannya belum memenuhi harapan para pengelola. Hal ini setidaknya terbukti dengan tidak banyaknya antusiasme warga yang menghendaki informasi melalui media online yang dipersiapkan. Selain itu, Salatiga belum meraih prestasi sebagai PPID yang informatif di tingkat Jawa Tengah maupun Nasional. Begitu juga dengan para pengelola KIP di tingkat PPID Pembantu maupun PPID yang tidak seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi maupun sistem informasi.

Atas dasar paparan yang telah dijelaskan, maka rumusan penelitiannya adalah bagaimanakah analisa kesiapan (readiness) PPID Pemkot Salatiga menerapkan KIP, dengan persoalan-persoalan penelitian, yaitu: Persoalan pertama, bagaimana analisa kesiapan penerapan KIP. Persoalan kedua, rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan penerapan KIP

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Keterbukaan Informasi Publik dan Dasar Hukum

Hak memperoleh informasi (right to information) bagi masyarakat Indonesia dilindungi oleh UU KIP No. 14 tahun 2008, dimana hak tersebut merupakan hak public yang memberikan akses masyarakat secara luas tanpa sekat pembeda (boardless) dan sekaligus menjadi langkah awal bagi bangsa Indonesia memasuki era informasi masyarakat terbuka (Marietha, Kusuma, & Amin, 2017). Amanat UU tersebut mewajibkan badan publik untuk membentuk unit pengelola informasi yang kemudian disebut sebagai Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), dimana PPID dapat ditunjuk melalui surat keputusan oleh para pimpinan di setiap daerah atau unit badan publik (Abdullah, 2010; Yasin et al., 2013). Tugas dan tanggungjawab PPID antara lain melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi pada masing-masing badan publik, termasuk pemerintah daerah (Abdullah, 2010; Pemerintah Republik Indonesia, 2008; Sastro, Yasin, Gunawan, Julitasari, & Bawor, 2010).

Asas atau prinsip dasar dari KIP yang dikelola oleh PPID adalah (Abdullah, 2010; Pemerintah Republik Indonesia, 2008; Yasin et al., 2013) pengelompokan informasi menjadi dua bagian, yaitu informasi publik dan dikecualikan, dimana informasi publik merupakan informasi yang dapat diakses oleh siapapun karena bersifat terbuka. Sedangkan informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat serta merta diakses oleh masyarakat karena memiliki karakteristik yang ketat dan hak akses terbatas. Artinya, informasi yang dikecualikan dapat dibuka bagi publik hanya jika memenuhi persyaratan serta melalui pengujian terlebih dahulu dan disepakati oleh pihak terkait melalui pertimbangan tertentu, misalnya telah diijinkan oleh pemiliknya untuk kepentingan yang lebih luas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan melalui cara yang sederhana.

PPID memiliki hak untuk menolak informasi yang dikecualikan, menolak untuk memberikan informasi publik jika tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku (Abdullah, 2010; Pemerintah Republik Indonesia, 2008; Sastro et al., 2010). Adapun informasi yang tidak dapat diberikan oleh PPID adalah informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

PPID juga memiliki kewajiban untuk mempersiapkan, mengelola, menyajikan informasi yang bersifat publik dengan akurat, tepat dan cepat kepada para pemohon dan tidak memberikan informasi yang dikecualikan (Abdullah, 2010; Pemerintah Republik Indonesia, 2008; Sastro et al., 2010). Berdasarkan tuntutan kewajiban tersebut, maka PPID harus memiliki

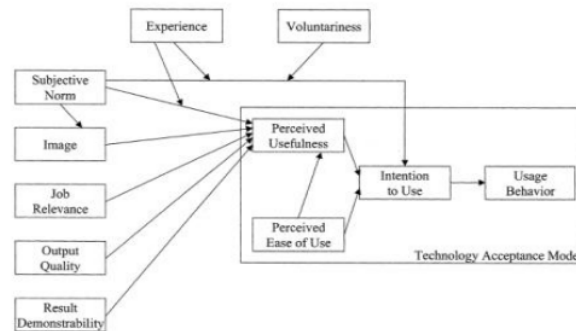
kemampuan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang baik agar pengelolaan KIP dapat berjalan dengan baik dan efisien serta diakses dengan mudah dan murah. PPID juga harus membuat mekanisme pertimbangan secara tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangan yang dimaksud di sini antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

#### b. Adopsi Teknologi Informasi Dengan Teori E-TAM

Ketika sebuah sistem baru diterapkan, maka diperlukan suatu keputusan, baik oleh pengambil keputusan maupun penggunanya, dimana keputusan tersebut adalah menerima sistem baru dan menerapkannya atau menolak sistem. Penerimaan terhadap sistem baru didasari oleh berbagai argumentasi yang biasanya dipengaruhi oleh perilaku penggunanya. Oleh karena itu, sebuah teori adopsi terhadap penerapan teknologi informasi, banyak digunakan untuk mengukur, menilai dan memahami sejauh mana dan bagaimana sistem baru tersebut diterima dan diterapkan pada suatu lingkungan organisasi atau diterima secara personal.

TAM diungkapkan oleh Davis dalam disertasinya untuk menjelaskan bagaimana pengguna akhir menerima dan bersedia menggunakan teknologi berdasarkan perilaku pengguna sehingga TAM merupakan model teoritis untuk menguji pengaruh karakteristik sistem pada penerimaan pengguna sistem informasi berbasis komputer (F. D. J. Davis, 1986). Kemudian pada tahun 1989, Davis dkk menyempurnakan model TAM dengan menambahkan komponen Eksternal dalam model yang dikembangkannya (F. D. Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989). Model TAM kembali mengalami pengembangan dari model sebelumnya, dimana kemudahan dan kegunaan memberikan pengaruh terhadap niat seseorang sehingga bersedia menjadi pengguna terhadap sistem yang diterapkan sebagai perilakunya sehari-hari (Venkatesh & Davis, 1996).

Pada tahun 2000, TAM kembali dikembangkan dan dikenal dengan Extended-TAM (E-TAM) atau juga sering disebut sebagai TAM-2 (Venkatesh & Davis, 2000). Secara prinsip, hal yang memberikan faktor pembeda antara TAM dengan E-TAM adalah faktor-faktor eksternal yang memberikan pengaruh terhadap kemanfaatan dan kemudahan, lebih dijabarkan dan detail, seperti tampak pada gambar 1.



Gambar 1. E-TAM  
sumber Venkatesh dan Davis (Venkatesh & Davis, 2000)

Beberapa peneliti menggunakan TAM sebagai dasar untuk pengujian terhadap adopsi sistem informasi di berbagai bidang, termasuk OGD (Dhillon, Caldeira, & Wenger, 2011; Eleftherios, 2017; Hossain & Chan, 2015; Kvamsdal, 2018; Loukis, Xenakis, & Charalabidis, 2010; Oliveira & Martins, 2014; Park, Saplan-Catchapero, & Jaegal, 2012; Taherdoost, 2018), tetapi tidak banyak yang menggunakan E-TAM/TAM-2 (Shih, 2004; Wirtz, Weyerer, & Ro, 2017) sebagai dasar pertimbangan pengujiannya.

### c. Metodologi Sistem Lunak (Soft Systems Methodology/SSM)

Pemikiran sistem lunak diperkenalkan pada 1980-an oleh Checkland dan rekannya sebagai pendekatan interpretif terhadap penerapan pemikiran sistem holistik, yang berbeda dari pendekatan analitis reduksionis untuk pemecahan masalah. Ini sangat cocok untuk kasus-kasus masalah berantakan yang tidak terstruktur yang rumit di mana solusi tidak terlihat dan para peserta memiliki beragam pandangan mengenai cara untuk mendekati atau melanjutkan dengan masalah tersebut. Pemikiran ini mencirikan situasi yang kompleks dan pluralis, dengan banyak variabel yang tidak dapat ditentukan.

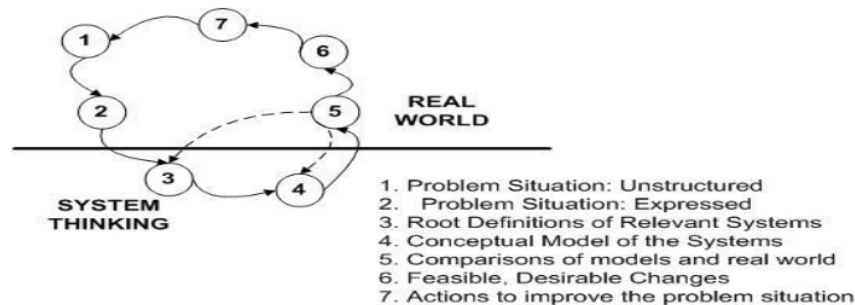
Metodologi Sistem Lunak adalah intinya, sebuah pendekatan berulang dari suatu analisis terhadap pandangan orang yang beragam terhadap apa yang dipikirkannya, untuk merumuskan dan menyusun pemikiran tentang masalah yang dihadapi. Prosesnya adalah pembangunan model konseptual solusi berdasarkan definisi akar dari sistem ideal yang diperlukan dan diambil dari gambaran yang kaya dari masalah yang diungkapkan. Model konseptual kemudian dibandingkan dengan kenyataan dan perdebatan dirangsang tentang asumsi yang mendasari dan perubahan yang diperlukan untuk menghasilkan solusi yang diinginkan. Metodologi Sistem Lunak bukan tentang menganalisis sistem yang ditemukan di dunia nyata, melainkan tentang menerapkan pemikiran sistem untuk masalah dalam situasi kompleks untuk memberikan serangkaian konstruksi intelektual yang menghasilkan pembelajaran dan pemahaman tentang variabel yang sering tersembunyi dalam situasi kompleks.

SSM adalah metodologi yang melakukan analisis secara sistematis berdasarkan masalah pada organisasi faktual yang kemudian digunakan untuk meningkatkan atau memperbaiki situasi pada organisasi dunia nyata (Francisco & Azevedo, 2009). SSM dapat digunakan untuk menganalisis dalam bidang studi sistem sosial maupun informasi, misalnya menganalisis masalah kecurangan oleh siswa pada saat melaksanakan ujian nasional (Iriani & Manongga, 2018), menganalisa bidang *e-government* (Sensuse & Ramadhan, 2012; Retnowati, Manongga & Sunarto, 2019), keterkaitan antara risiko tata kelola dalam masyarakat (Taylor, 2016). Ada beberapa alasan lain mengapa menggunakan SSM dalam membangun sistem informasi. Alasan-alasan tersebut antara lain: 1) SSM dapat mendukung pemikiran yang sistemik, 2) sistem informasi perlu diperiksa dan dianalisis secara konsisten untuk mengembangkan sistem informasi organisasi, 3) mendukung model analisis streaming logika yang kemudian diperbandingkan dengan proses aslinya, 4) menawarkan proses pembelajaran yang terus menerus, 5) mendukung partisipasi para pemangku kepentingan, 6) histori informasi terjaga dengan baik, 7) hasil jawaban para pemangku kepentingan menjadi sarana untuk penataan ulang dan mengidentifikasi solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi pada waktu tertentu, 8) konteks dari pengembangan sistem informasi ditentukan sendiri oleh para pemangku kepentingan (Bennetts, Wood-harper, & Mills, 2000). Selain alasan-alasan tersebut, pada SSM digunakan pula konsep CATWOE dan *Rich Picture* cukup mudah digunakan dan dipahami. Dengan demikian manfaat utama SSM adalah mengubah masalah yang tidak terstruktur menjadi terstruktur sesuai dengan perubahan yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan. Tabel 1. menjelaskan tentang CATWOE.

Tabel 1. Deskripsi CATWOE (Checkland, 2000)

<i>Elemen</i>	<i>Deskripsi CATWOE</i>
<i>C (Customer) → Pelanggan</i>	<i>Siapa yang mendapat manfaat dari aktivitas sasaran?</i>
<i>A (Actor) → Aktor</i>	<i>Siapa yang melaksanakan kegiatan</i>
<i>T (Transformation) → Transformasi</i>	<i>Apa yang harus diubah sehingga input menjadi output?</i>
<i>W (World-view) → Cara Pandang Dunia</i>	<i>Pandangan seperti apa yang membuat sistem itu bermakna?</i>
<i>O (Owner) → Pemilik</i>	<i>Siapa yang dapat menghentikan kegiatan?</i>
<i>E (Environment) → Lingkungan</i>	<i>Apa hambatan yang ada dalam lingkungan sistem?</i>

SSM dengan alat CATWOE dan Rich Picture juga dapat menangani masalah perilaku manusia. Menurut Checkland (Checkland, 2000), SSM terdiri atas 7 tahap, meliputi 1) menganalisa situasi masalah yang sedang terjadi, 2) menganalisa struktur dan proses organisasi yang saat ini digunakan termasuk teknologinya, 3) menganalisa sistem yang relevan menggunakan teknik CATWOE, 4) membangun model konseptual sesuai dengan definisi root yang diperoleh dari analisis CATWOE, 5) membandingkan model konseptual dengan kenyataan, mempertimbangkan kemungkinan pola adopsi yang dapat dilakukan, 6) melakukan pengembangan sistem yang tepat dan diinginkan serta membuat perubahan, 7) melakukan evaluasi untuk perubahan selanjutnya (Francisco & Azevedo, 2009). Tahap-tahap (1) sampai (7) diwakili dalam gambar 2, yaitu tujuh tahap model SSM.



Gambar 2. SSM Model (Checkland, 2000)

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Sistem Lunak atau *Soft System Methodology* (SSM). Jenis penelitian ini dipilih karena metode kualitatif tepat digunakan untuk meneliti sebuah obyek penelitian yang natural, dimana peneliti menjadi subyek dari penelitian itu. PPID secara natural merupakan sebuah obyek baru dan peneliti bersifat independen untuk memahami dan menggali informasi sebanyak-banyaknya pada obyek, sebagai instrument kunci. Sedangkan pendekatan SSM diharapkan dapat membantu peneliti untuk membangun kerangka berpikir sistem (*System Thinking*) yang esensinya adalah membangun suatu model sistem untuk berusaha memecahkan masalah melalui penyempurnaan model konseptual setelah membandingkan dengan situasi atau permasalahan yang dihadapi (Bennetts et al., 2000).

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara untuk mendapatkan data primer maupun sekunder, yaitu:

a. Metode Wawancara mendalam (indepth interview)

Dalam penelitian SSM, wawancara sangat diperlukan untuk mengklarifikasi dan konfirmasi ulang terhadap data-data serta keterangan dari narasumber. Wawancara mendalam juga dilakukan untuk memperoleh keterangan yang lebih terperinci serta detail tentang fenomena atau situasi permasalahan

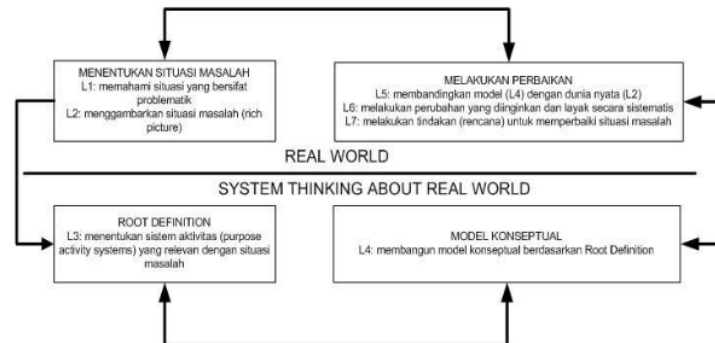
b. Metode Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang situasi yang sebenarnya secara langsung. Peneliti terjun langsung ke lapangan atau melakukan orientasi lapangan untuk mencari jawaban-jawaban yang ingin diketahui peneliti dengan melakukan orientasi langsung di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil observasi dan wawancara yang berbentuk dokumen, tulisan, gambar, rekaman audio/video.

Teknik menganalisis data pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sistem dengan menggunakan tujuh tahapan proses SSM, seperti tampak pada gambar 2.3, dimulai dari menentukan situasi masalah pada PPID, menentukan definisi akar persoalan (root definition), membangun model konseptual dan melakukan perbaikan model konseptual dengan cara memperbandingkan dunia nyata dengan model.



Gambar 3. Tujuh Langkah Kerangka Kerja SSM

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### a. Situasi Perencanaan Pengelolaan KIP di Pemkot Salatiga

Secara kelembagaan, penerapan KIP di Pemkot Salatiga telah mengikuti amanat undang-undang. Sekalipun demikian, dalam rangka memahami situasi permasalahan yaitu proses perencanaan pengelolaan KIP, maka dilakukan kajian terhadap regulasi serta dokumen yang terkait dengan perencanaan dan peran setiap OPD. Dari hasil analisis terhadap regulasi dan dokumen terkait, diketahui beberapa fakta sebagai berikut.

Pertama, PPID mulai menginisiasi implementasi OGD dalam wujud pengelolaan data dan informasi sejak tahun 2018, dibuktikan dengan regulasi Perwali No. Hal ini memberikan arti bahwa **inisiasi** didasarkan atas 2 faktor (a) **faktor eksternal**, yaitu regulasi wajib sebagai badan publik yaitu pemerintah daerah dan regulasi perwal, (b) **faktor organisasi (leadership, komitmen bersama)** dimana walikota membuat keputusan untuk melaksanakan dan mengimplementasikan KIP. Sekalipun demikian, faktanya dalam penilaian PPID Jawa Tengah pada tahun 2019, salah satu unsur penilaian kehadiran pimpinan mendapatkan poin kosong. Hal ini mengisyaratkan bahwa persoalan komitmen menjadi bagian yang layak menjadi sebuah catatan.

Kedua, Inisiasi yang didasari oleh minimal dua faktor tersebut ditindaklanjuti dengan implementasi PPID melalui pembentukan organ dan penentuan aktor pengelolanya, penentuan visi, maklumat, SOP serta aturan yang mendukung. Sekalipun demikian, dapat diketahui bahwa sampai saat ini belum semua OPD menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Terjadi perbedaan **persepsi** baik bahwa penerapan KIP harus direalisasikan, dikawal dan dievaluasi. Melalui situs PPID, terdapat hanya 4 PPID Pembantu yang secara terbuka terkoneksi untuk memberikan informasi tertutup maupun terbuka. Fakta ini memberikan indikasi bahwa penerapan KIP belum sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip *good governance*. Ketiga, Prestasi PPID sampai saat ini masih berada pada level cukup informatif dengan nilai 78,62. Padahal level-level dalam penilaian PPID adalah informatif (90-100), menuju informatif (80-89.9), cukup informatif (60-79.9), kurang informatif (40-59.9) dan tidak informatif (39.9). Setiap OPD dan pengelola PPID belum memiliki upaya yang besar agar implementasi KIP di wilayahnya mendapatkan apresiasi dan penilaian yang baik dari pihak lain.



Secara lebih detil, peneliti mencermati setiap pengelola yaitu para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan KIP di PPID maupun OPD Pembantu. Hal ini menjadi salah satu indikator kesiapan pengelolaan KIP di suatu daerah, yaitu kesediaan para pengelolanya, individu pengelola KIP untuk menerapkan KIP secara konsisten. Potret kesediaan mengadopsi sistem baru yaitu pengelolaan KIP, dapat disajikan sebagai berikut. Pertama, para pengelola menyadari bahwa KIP adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan karena telah memiliki payung hukum dan sekaligus penunjukan PPID merupakan sebuah kewajiban untuk ditaati dan dimplementasikan. Kedua, beberapa pengelola menyadari bahwa pengelolaan KIP belum pernah ada sebelumnya, tetapi apabila dipelajari melalui peraturan yang berlaku, para pengelola berharap dapat segera menyesuaikan diri, meskipun memerlukan waktu. Ketiga, beberapa pengelola menyadari tugasnya sebagai ASN yang ditunjuk mengelola KIP sebagai sebuah kewajiban, belum sampai kepada kesukarelaan, melainkan kesediaan sebagai akibat dari regulasi. Keempat, beberapa pengelola tidak menyadari bahwa pengelolaan KIP saat ini menjadi bagian dari penilaian terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi maupun Pusat. Prestasi hasil penilaian tidak terlalu mengusik rasa profesionalitas beberapa ASN yang terlibat, tetapi dipahami sebagai fakta bahwa nilai prestasi PPID di Pemkot Salatiga belum optimal. Kelima, beberapa pengelola menyatakan bahwa penerapan KIP sesungguhnya relevan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN, tetapi dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi karena kesediaan untuk menyiapkan informasi berkala, setiap saat, serta merta. Selain itu juga mengusulkan informasi yang dikecualikan. Sebelumnya, para pengelola tersebut tidak melakukannya, tetapi para pengelola hanya menyiapkan informasi apabila diminta saja. Jika dikaitkan dengan pengelolaan basis data yang menghasilkan informasi maupun dokumen, beberapa pengelola menjelaskan bahwa tidak semua ASN yang mendapatkan tugas di PPID memahami dan memiliki bidang pendidikan Teknologi Informasi. Hal ini seringkali menjadi kendala bagi beberapa orang pada saat menjalankan tugasnya. Keenam, penerapan KIP menghasilkan sebuah upaya keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam wujud ketersediaan data, informasi dan dokumen. Hampir semua pengelola menyetujui hal tersebut dan memahami bahwa output dari pengelolaan KIP yang dilakukan oleh PPID memiliki dampak positif bagi masyarakat. Para pengelola juga dapat menjelaskan bagaimana proses pengelolaan KIP yang seharusnya dilakukan dengan baik. Tetapi terkendala oleh beberapa hal seperti aspek SDM, Sumber Daya Teknologi, Kesediaan Berbagi Informasi serta Komitmen bersama yang belum kuat. Ketujuh, para pengelola maupun pengambil keputusan menyadari pula bahwa keterlibatan masyarakat untuk memahami dan ikut serta menyelesaikan KIP belum optimal.

Karakteristik pengelolaan KIP yang dibutuhkan antara lain; bahwa pemerintah diharapkan mampu berperan aktif terhadap tujuan KIP bagi masyarakat, pemerintah harus berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan KIP ke arah transformasi pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam menyusun perencanaan yang berkelanjutan pemerintah juga harus lebih mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan tujuan atau administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program percepatan pengelolaan KIP, tidak hanya sekedar prosedural. Secara ringkas peran pemkot Salatiga sebagai pemilik masalah sekaligus yang mempunyai tugas sebagai pemecah masalah dalam kesediaan pengelolaan KIP harus bisa lebih aktif dalam mewujudkan orientasi KIP dan perubahan yang dicita-citakan, pemerintah harus bisa menjadi administrator sekaligus agen perubahan dalam mewujudkan KIP berkelanjutan.

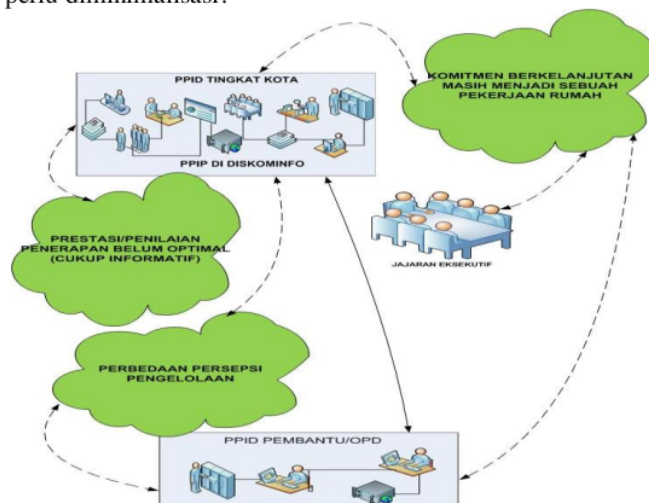
#### **b. Membangun Model Konseptual Untuk Memperbaiki Situasi Permasalahan**

Dalam rangka membangun model konseptual untuk memperbaiki situasi permasalahan, dibutuhkan tahapan sesuai SSM. Tujuh tahapan dalam SSM seperti digambarkan pada gambar 2 (dua) dikelompokkan menjadi empat tahapan utama sebagai berikut: a. Memahami dan

menggambarkan situasi masalah kesiadaan pengelolaan KIP dalam bentuk Rich Picture. Pada tahapan ini, yang diperlukan adalah langkah satu (L1) dan langkah dua (L2) yaitu memahami situasi yang bersifat problematik dan menggambarkan situasi masalah dalam bentuk rich picture. Tahapan pertama dalam SSM yaitu mengenali dan memahami situasi permasalahan tidak terstruktur, yaitu permasalahan yang nyata (real) dalam obyek yang diteliti yaitu strategi kesiapan pengelolaan KIP. Situasi permasalahan yang semula tidak terstruktur kemudian dilakukan strukturisasi permasalahan dan proses yang terjadi dalam pengelolaan KIP dan digambarkan dalam rich picture, yaitu ekspresi yang menyerupai bentuk kartun untuk memunculkan isu, konflik dan fitur-fitur lain yang menarik dan problematik. Tujuan pembuatan rich picture adalah untuk menangkap, memberi informasi, menemukan hal-hal penting atau utama, struktur dan penekanan dalam situasi, bagaimana proses berjalan, penemuan isu-isu penting dalam situasi serta untuk menyusun beberapa model aktivitas.

Berdasarkan kajian terhadap dokumen, regulasi di bidang KIP, menggali persepsi OPD tentang perannya dalam proses perencanaan, peneliti juga mengadakan diskusi untuk menyimpulkan permasalahan perencanaan pengelolaan KIP dan menggambarkan dalam bentuk Rich Picture, sebagai berikut: membuat definisi permasalahan dan menentukan sistem aktivitas yang relevan dengan situasi permasalahan, proses pendefinisian sistem permasalahan meliputi pemilihan sistem aktivitas manusia (purposeful activity models) bertujuan dari situasi permasalahan. Sudut pandang yang berbeda-beda harus dibuatkan definisi yang jelas mengenai aktivitas tersebut sebagai root definition. Root definition adalah cara untuk menunjukkan ekspresi dari aktivitas yang akan ditransformasikan (T). Berdasarkan root definition kemudian dilakukan identifikasi potensi perubahan sehingga T dapat dielaborasi dengan mendefinisikan elemen-elemen lain, membentuk CATWOE. Pengertian unsur-unsurnya dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Customers atau Clients (pelanggan), adalah orang/sekelompok orang/organisasi yang dikenai oleh aktivitas sistem
- 2) Actors (aktor-aktor), adalah pihak-pihak yang melaksanakan aktivitas pemecahan masalah.
- 3) Transformation process (proses transformasi), adalah aktivitas yang akan diubah
- 4) World view (cara pandang terhadap realitas), yaitu dampak yang diperoleh
- 5) Owners (pemilik), adalah pihak yang dapat menghentikan aktivitas transformasi
- 6) Environmental constraints (hambatan lingkungan), adalah hambatan dalam lingkungan sistem yang perlu diminimalisasi.



Gambar 4. rich picture

Berikut adalah hasil analisa CATWOE.

Tabel 2. Analisa CATWOE

<b>Komponen Sistem Permasalahan</b>	<b>Hasil Definisi Sistem Permasalahan</b>
Root Definition	Penerapan KIP –dengan strategi organisasi (Q) untuk penerapan KIP yang memberikan dampak positif (R) melalui perencanaan <i>readiness</i> pengelolaan KIP yang memegang nilai <i>good governance</i> (P)

**Analisa CATWOE**

C (Client/Customers): orang/sekelompok orang/organisasi yang dikenai oleh aktivitas sistem	(Apa manfaat dan mengapa sistem dianggap penting) - PPID tingkat kota: para pengelola yang akan menjalankan penerapan KIP - PPID Pembantu : penyedia informasi utama yang dikoordinasi oleh PPID tingkat kota
A (Actors); orang/sekelompok orang/organisasi yang melaksanakan kegiatan	(Siapa yang melaksanakan mengimplementasikan aktivitas?) - Eksekutif : mereka yang membuat regulasi dan kebijakan secara top down - PPID tingkat kota: mereka yang mengelola informasi untuk masyarakat - PPID Pembantu: mereka yang menyediakan informasi pada level terendah untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui PPID tingkat kota
T (Transformations): yang harus diubah	(Apa yang harus diubah sehingga input menjadi output?) Penerapan KIP harus dijalankan dan ditingkatkan melalui perencanaan strategi <i>readiness</i> organisasi dan para pengelola

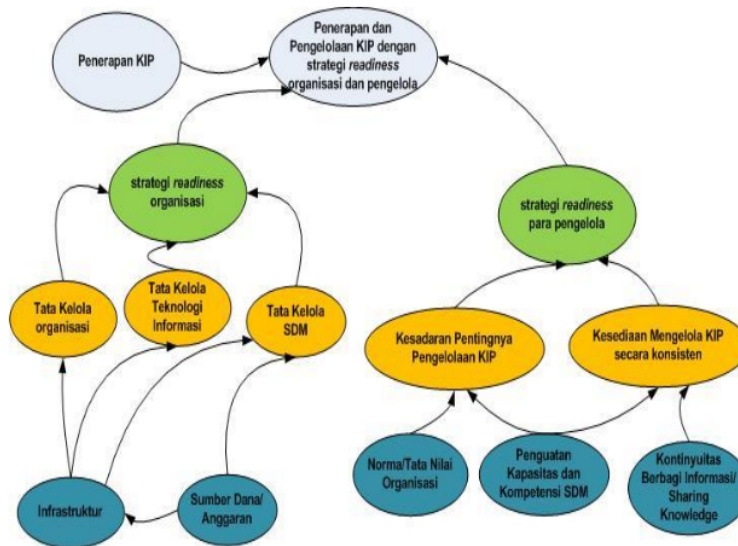
<b>Komponen Sistem Permasalahan</b>	<b>Hasil Definisi Sistem Permasalahan</b>
W (Weltansahuung / World View): dampak yang diperoleh	(apa dampak dari membuat sistem itu?) Readiness penerapan KIP dapat memberikan dampak positif bagi individu, organisasi maupun masyarakat sehingga tujuan <i>good governance</i> dapat tercapai
O (Owners): Yang dapat menghentikan aktivitas transformasi	(Siapa yang dapat menghentikan transformasi?) - Eksekutif : mereka yang membuat regulasi dan kebijakan secara top down - PPID tingkat kota: mereka yang mengelola informasi untuk masyarakat - PPID Pembantu: mereka yang menyediakan informasi pada level terendah untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui PPID tingkat kota
E (Environment) Constraint: yang dapat menghambat	(Apa hambatan yang ada dalam lingkungan sistem?) - Pergantian pimpinan maupun rotasi pegawai dapat menghambat penerapan KIP jika komitmen mereka tidak terjaga dengan baik, yaitu komitmen terhadap regulasi dan nilai-nilai organisasi - Ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur yang tidak terjaga dengan baik dapat menghambat penerapan KIP - Knowledge Sharing yang tidak berjalan dengan baik dapat menghambat penerapan KIP

	- Kualitas dan kapasitas SDM terutama di bidang IT yang tidak merata dapat pula menghambat penerapan KIP
--	--

#### Purposeful Activity

1.	Merencanakan strategi organisasi, melalui: a) Identifikasi tingkat kesiapan (readiness) kelembagaan b) Identifikasi tingkat kesiapan (readiness) individu pengelola
2	Melakukan strategi kesiapan organisasi terhadap pengelolaan KIP, melalui: a) penguatan tata kelola organisasi melalui penyiapan regulasi, prosedur operasional standar dan lain-lain pendukung b) penguatan tata kelola teknologi informasi melalui penentuan proses dan mekanisme pengelolaan data dan informasi, pemeliharaan dan evaluasinya c) penguatan tata kelola SDM melalui pelatihan, pendampingan terutama di bidang IT d) penguatan infrastruktur dengan ketersediaan anggaran dan perawatan dan upgrading software, hardware dan jaringan
3	Melakukan strategi kesiapan pengelola terhadap pengelolaan KIP, melalui: a) penyadaran terus menerus pentingnya pengelolaan KIP yang berdampak pada good governance melalui penerapan norma/tata nilai organisasi, penerapan reward dan punishment b) mendorong kesediaan dalam kesadaran penuh bahwa pengelolaan KIP memberi pengaruh terhadap individu untuk berprestasi, meningkatkan rasa kebanggaan, meningkatkan kapasitas personal dan pengalaman kerja individu c) menjamin proses berbagi pengetahuan terus berjalan dengan baik
4	Membuat tolak ukur keberhasilan proses transformasi ke penerapan KIP yang berkelanjutan dengan kriteria 5E yaitu: a) Efficacy yaitu menunjukkan keberhasilan transformasi (T): dihasilkan output tertentu yaitu tingkat kesiapan individu dan lembaga menerapkan KIP terlaksana dengan baik b) Effective yaitu pertimbangan yang menunjukkan pencapaian transformasi yang dihasilkan dalam waktu tertentu c) Efficient yaitu penggunaan sumberdaya yang seminimal mungkin untuk mencapai transformasi yang diharapkan d) Ethic yaitu pertimbangan dari segi kepantasan yaitu apakah sesuai dengan norma, nilai yang dianut atau dipegang oleh masyarakat dan sesuai dengan PUU yang berlaku e) Elegance yaitu tindakan yang diambil tidak sembarangan karena telah melalui proses perencanaan yang tepat.

Sedangkan usul rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki hasil analisa readiness yang sedang terjadi dalam rangka penerapan KIP adalah model konseptual yang diharapkan mampu mendukung transformasi.



Gambar 5. Rekomendasi Model Konseptual

## 5. KESIMPULAN

Kesiapan pengelolaan KIP di Pemkot Salatiga sudah berjalan prosedural dan formatif, kurang menunjukkan substansi sektor kesiapan mengadopsi pengelolaan KIP yang berkesinambungan, cenderung birokratif-administratif, serta rendah komitmen di setiap OPD untuk menjalankan pengelolaan KIP secara konsisten. Permasalahan yang melingkupi situasi kesiapan pengelolaan KIP di Pemkot Salatiga dapat dianalisa berdasarkan kesiapan kelembagaan atau organisasi dan kesiapan dari perspektif ASN pengelolanya.

Berdasarkan kedua persoalan yang tampak yaitu readiness, maka diusulkan perlunya strategi kesiapan organisasi dan strategi kesiapan individu. Dimana kesiapan organisasi harus diperbaiki dari sisi tiga tata kelola, yaitu 1) organisasi, 2) teknologi informasi dan 3) sumber daya manusia. Ketiganya harus didukung oleh infrastruktur dan pendanaan yang memadai. Sedangkan strategi readiness individu dilakukan melalui penguatan-penguatan melalui kesadaran pentingnya pengelolaan KIP dan kesiapan sukarela untuk mengelola KIP secara konsisten. Kedua strategi ini dapat dilakukan dengan pendampingan, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, pemberlakuan reward dan punishment sesuai dengan tata nilai organisasi serta pengontrolan dan evaluasi terhadap keberlangsungan berbagi pengetahuan di antara para pengelola KIP.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bennetts, P. D. C., Wood-harper, A. T., & Mills, S. (2000). An Holistic Approach to the Management of Information Systems Development — A View Using a Soft Systems Approach and Multiple Viewpoints. *Systemic Practice and Action Research*, 13, 189–205.
- [2] Charalabidis, Y., Loukis, E., & Alexopoulos, C. (2014). Evaluating Second Generation Open Government Data Infrastructures Using Value Models. In *2014 47th Hawaii International Conference on System Science Evaluating*. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2014.267>
- [3] Checkland, P. (2000). Soft Systems Methodology : A Thirty Year Retrospective, 58, 11–58.
- [4] Conradie, P., & Choenni, S. (2014). On the barriers for local government releasing open

- data. *Government Information Quarterly*, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.01.003>
- [5] Davies, T. (2010). *Open data , democracy and public sector*. University of Oxford, UK. Retrieved from <http://www.opendataimpacts.net/report/>
- [6] Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models User Acceptance Of Computer Technology: A Comparison Of Two, (September 2016). <https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982>
- [7] Davis, F. D. J. (1986). *A Technology Acceptance Model For Empirically Testing New End-User Information Systems: Theory And Results*.
- [8] Dhillon, G. S., Caldeira, M., & Wenger, M. R. (2011). Intentionality and power interplay in IS implementation: The case of an asset management firm. *Journal of Strategic Information Systems*, 20(4), 438–448. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2011.09.003>
- [9] DPADM UN-DESA. (2013a). *Guidelines on Open Government Data for Citizen Engagement*. New York. Retrieved from <http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/Guidelines on OGDCE May17 2013.pdf>
- [10] DPADM UN-DESA. (2013b). OPEN GOVERNMENT DATA AND SERVICES. Retrieved February 23, 2018, from <https://publicadministration.un.org/en/ogd>
- [11] Eleftherios, P. (2017). *OPEN GOVERNMENT DATA EVALUATION MODELS: THEORY AND PRACTICE*.
- [12] European, & Commission Union. (2011). *Digital Agenda : Commission ' s Open Data Strategy , Questions & answers*. Brussels: European Commission Union.
- [13] Francisco, R. da P., & Azevedo, A. (2009). An SSM-Based Approach to Implement a Dynamic An SSM-Based Approach to Implement a. In *IFIP Advances in Information and Communication Technology*. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-04568-4>
- [14] Geiger, C. P., & Von Lucke, J. (2012). Open government and (linked)(open)(government)(data). *JeDEM-EJournal of EDemocracy and Open Government*, 4(2), 265–278. <https://doi.org/10.29379/jedem.v4i2.143>
- [15] Ginsberg, W. R. (2011). *The Obama Administration ' s Open Government Initiative : Issues for Congress*.
- [16] Gonzalez-zapata, F., & Heeks, R. (2015). The multiple meanings of open government data: Understanding different stakeholders and their perspectives. *Government Information Quarterly*, 32(4), 441–452. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.09.001>
- [17] Government of Prince Edward Island. (2018). Open Data Principles \_ Government of Prince Edward Island. Retrieved February 13, 2019, from <https://www.princeedwardisland.ca/en/information/finance/open-data-principles>
- [18] Hartley, J., & Hartley, J. (2005). Innovation in Governance and Public Services : Past and Present Innovation in Governance and Public Services : Past and Present. *Public Money and Management*, (February 2005), 27–34. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9302.2005.00447.x>
- [19] Hossain, M. A., & Chan, C. (2015). Open data adoption in Australian government agencies : an exploratory study, (Mazumder 2014).
- [20] Hossain, M. A., Dwivedi, Y. K., & Rana, N. P. (2016). State-of-the-art in open data research: Insights from existing literature and a research agenda. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, 9392(March). <https://doi.org/10.1080/10919392.2015.1124007>
- [21] Iriani, A., & Manongga, D. (2018). Using Soft Systems Mehtodology As An Approach To Evaluate Cheating In The National Examination. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 96(11).
- [22] Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits , Adoption Barriers and

- Myths of Open Data and Open Government. *Information Systems Management ISSN*., 29(4), 258–268. <https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740>
- [23] Jetzek, T., & Avital, M. (2013). The Generative Mechanisms Of Open Government Data. *European Conference on Information Systems (ECIS)*, 179. Retrieved from <http://aisel.aisnet.org/ecis2013/179>
- [24] Kucera, J., & Chlapek, D. (2014). Benefits and Risks of Open Government Data. *Journal of Systems Integration*, 30–41. <https://doi.org/10.20470/jsi.v5i1.185>
- [25] Kvamsdal, P. (2018). Open Government Data - A Literature Review and a Research Agenda, (December 2017).
- [26] Loukis, E., Xenakis, A., & Charalabidis, Y. (2010). An evaluation framework for e-participation in parliaments. *International Journal of Electronic Governance*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.1504/IJEG.2010.032729>
- [27] Meijer, R., Conradie, P., Choenni, S., & Meijer, R. (2014). Reconciling Contradictions of Open Data Regarding Transparency , Privacy , Security and Trust. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 9(3). <https://doi.org/10.4067/S0718-18762014000300004>
- [28] Mohr, L. B., Rosenstock, I., Converse, P., Heady, F., Jennings, M. K., & Northrop, R. (1963). DETERMINANTS OF INNOVATION IN ORGANIZATIONS. *American Political Science Review*, 1, 111–126. <https://doi.org/10.1017/S0003055400261510>
- [29] Mueller, V., Rosenbusch, N., Bausch, A., & Mueller, V. (2013). Success Patterns of Exploratory and Exploitative Innovation: A Meta-Analysis of the Influence of Institutional Factors. *Journal of Management*, 39(6). <https://doi.org/10.1177/0149206313484516>
- [30] Obama, B. (2009). Transparency and Open Government. Retrieved January 20, 2013, from [http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda\\_fy2009/m09-12.pdf](http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_fy2009/m09-12.pdf)
- [31] Obama, B. (2011). About Open Government. Retrieved December 7, 2015, from <https://obamawhitehouse.archives.gov/open/about>
- [32] OEDC. (2018). Open Government Data - OECD. Retrieved from <http://www.oecd.org/gov/digital-government/open-government-data.htm>
- [33] Oliveira, T., & Martins, M. F. (2014). Literature Review of Information Technology Adoption Models at Firm Level, (May).
- [34] Open Council Data. (2007). The Annotated 8 Principles of Open Government Data (Open Gov Data). Retrieved from <https://opengovdata.org/>
- [35] Open Data Barometer. (2015). Key Findings OGD by Open Data Barometer 2nd edition. Retrieved October 10, 2016, from <https://opendatabarometer.org/2ndEdition/summary/>
- [36] open government advocates. (2007). 8 Principles of Open Government Data. Retrieved from [https://public.resource.org/8\\_principles.html](https://public.resource.org/8_principles.html)
- [37] Open Government Working Group. (2007). 8 Principles of Open Government Data. Retrieved from <http://workspace.unpan.org/sites/internet/Documents/UNPAN042947.pdf>
- [38] Open Knowledge Foundation. (2011). *Beyond Access : Open Government Data & the Right to ( Re ) use Public Information*. Madrid, Spain. Retrieved from [https://www.access-info.org/wp-content/uploads/Beyond\\_Access\\_7\\_January\\_2011\\_web.pdf](https://www.access-info.org/wp-content/uploads/Beyond_Access_7_January_2011_web.pdf)
- [39] Park, T., Saplan-Catchapero, V. J., & Jaegal, D. (2012). Predicting Knowledge Sharing Intentions in the Public Sector : Comparing TAM with TPB. *International Review of Public Administration*, 17(2), 93–119. <https://doi.org/10.1080/12294659.2012.10805229>
- [40] Pemerintah Republik Indonesia. UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pub. L. No. 14/2008 (2008). Indonesia: [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org). Retrieved from <https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/view/uu-nomor-14-tahun-2008-3>
- [41] Pratikno, Sukarno, A. W., Srikandini, A. G., Rahmawati, A., Hanif, A., Purwanto, E. A., ... Setianto, W. A. (2012). *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi dalam*

- Pemerintahan Lokal Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008* (1st ed.). Yogyakarta: Fisipol UGM Yogyakarta dan Yayasan TIFA.
- [42] Retnowati, Retnowati., Manongga, Danny., Sunarto, Hari. (2019). Development of Sustainability Systems for Open Government Data (OGD) Management by Combining the SHEL Model and Soft Systems Methodology. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 97(12), 3227-3244. <http://www.jatit.org/volumes/Vol97No12/1Vol97No12.pdf>.
- [43] Rogers, E. . (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press. New Yor.
- [44] Safarov, I. (2018). Institutional Dimensions of Open Government Data Implementation : Evidence from the Netherlands, Sweden, and the UK. *Public Performance & Management Review*, 0(0), 1–24. <https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1438296>
- [45] Scassa, T. (2014). Privacy and Open Government. *Future Internet*. <https://doi.org/10.3390/fi6020397>
- [46] Sensuse, D. I., & Ramadhan, A. (2012). Enriching Soft Systems Methodology ( SSM ) With Hermeneutic in e-Government Systems Development Process. *IJCSI International Journal of Computer Science Issues*, 9(1).
- [47] Shih, H. (2004). Extended technology acceptance model of Internet utilization behavior, 41(48), 719–729. <https://doi.org/10.1016/j.im.2003.08.009>
- [48] Smallwood, R. F. (2014). *Information Governance: Concepts, Strategies And Best Practices*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- [49] Solar, M., Concha, G., & Meijueiro, L. (2012). A Model to Assess Open Government Data in Public Agencies. In *International Conference on Electronic Government* (pp. 1–12).
- [50] Sunlight Foundation. (2010). Ten Principles For Opening Up Government Information. Retrieved from <https://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles/>
- [51] Taherdoost, H. (2018). A review of technology acceptance and adoption models Costing models for capacity optimization Trade-off between used capacity operational efficiency. *Procedia Manufacturing*, 22, 960–967. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.03.137>
- [52] Taylor, I. (2016). Using First Nations Systems Thinking to Operationalize Sustainable Development. In *Managing Complexity From Problem Framing to Problem Solving* (p. 307). London: Springer.
- [53] Tim Open Government Indonesia. (2012). *Laporan Pelaksanaan Open Government Indonesia Tahun 2012 Open Government Indonesia: Era Baru Keterbukaan Pemerintah*. Jakarta. Retrieved from <http://opengovindonesia.org/front/detail/news/laporan-pelaksanaan-open-government-indonesia-tahun-2012>
- [54] Venkatesh, V., & Davis, F. D. (1996). A model of the antecedents of perceived ease of use : Development and test. *Decision Sciences*, 27(3).
- [55] Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model : Four Longitudinal Field Studies. *Management Science*, 46(2), 186–204.
- [56] Vries, H. De, Bekkers, V., & Tummers, L. (2014). Innovation in the Public Sector : A Systematic Review and Future Research Agenda. In *Speyer: EGPA conference*. Rotherdam. Retrieved from [http://www.lipse.org/userfiles/uploads/Innovation in the public sector - De Vries Bekkers Tummers.pdf](http://www.lipse.org/userfiles/uploads/Innovation%20in%20the%20public%20sector%20-%20De%20Vries%20Bekkers%20Tummers.pdf)
- [57] Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Ro, M. (2017). Open government and citizen participation : an empirical analysis of citizen expectancy towards open government data. *International Review of Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.1177/0020852317719996>
- [58] Wisdom, J. P., Ho, K., & Chor, B. (2013). Innovation Adoption : A Review of Theories and Constructs. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0486-4>



- [59] Zuiderwijk, A., Helbig, N., Gil-García, J. R., & Janssen, M. (2014). Special Issue on Innovation through Open Data\_ Guest Editors' Introduction. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, Vol.9(No. 2). <https://doi.org/10.4067/S0718-18762014000200001>
- [60] Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2013). A Coordination Theory Perspective to Improve the Use of Open Data in Policy-Making. In *International Conference on Electronic Government* (pp. 38–49). Koblenz, Germany. <https://doi.org/DOI> [https://doi.org/10.1007/978-3-642-40358-3\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-642-40358-3_4)
- [61] Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2014). The negative effects of open government data - Investigating the dark side of open data. In *Proceedings of the 15th Annual International Conference on Digital Government Research* (pp. 147–152). Aguascalientes, Mexico: ACM New York, NY, USA ©2014. <https://doi.org/10.1145/2612733.2612761>
- [62] Zuiderwijk, A., Janssen, M., & Ronald, S. C. (2014). Design principles for improving the process of publishing open data. *Transforming Government : People , Process and Policy*, 8(2), 185–204. <https://doi.org/10.1108/TG-07-2013-0024>

# ANALISIS READINESS PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DENGAN PENDEKATAN SOFT SYSTEMS METHODOLOGY (SSM)

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**11** %

SIMILARITY INDEX

**11** %

INTERNET SOURCES

**2** %

PUBLICATIONS

**5** %

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

3%

★ **issuu.com**

Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On